

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan daerah adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Ini adalah prosedur yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup penduduk suatu daerah, bukan sekadar kumpulan proyek nyata atau acara tahunan. Sejak pembentukan otonomi daerah pada tahun 2001, yang memberikan pemerintah daerah lebih banyak wewenang untuk mengelola sumber daya dan memilih jalur pembangunan mereka sendiri, pembangunan daerah telah tumbuh dan berpengaruh dalam lingkungan Indonesia. Sejak saat itu, daerah memiliki lebih banyak kebebasan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal.

Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan daerah secara konseptual dapat dilihat sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta tata kelola, melalui kebijakan yang terencana dan terorganisir, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, transformasi sosial yang lebih adil, dan peningkatan kapasitas masyarakat, di samping pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyoroti fakta bahwa pembangunan melibatkan peningkatan standar hidup masyarakat secara keseluruhan, di samping metrik seperti PDB daerah, tingkat investasi, dan infrastruktur. Konsep pembangunan daerah di Indonesia telah berkembang seiring

dengan pergeseran paradigma tata kelola. Pembangunan pada awal era Orde Baru sebagian besar bersifat top-down, dengan pemerintah pusat menetapkan hampir semua tujuan pembangunan. Keterlibatan pemerintah daerah terbatas pada implementasi. Namun, paradigma ini mengalami perubahan signifikan setelah reformasi. Pemerintah daerah mampu membuat rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang lebih akurat mewakili kebutuhan masyarakatnya karena otonomi daerah. Pergeseran ini sejalan dengan pandangan para ahli seperti Rondinelli (1981), yang menekankan bahwa perencanaan harus dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat sasaran untuk memastikan pembangunan yang efektif.

Karena perubahan ini, pembangunan daerah harus mencakup sejumlah faktor, termasuk lingkungan, layanan kesehatan dan pendidikan, ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, dan desain spasial. Para ahli di bidang perencanaan pembangunan sepakat bahwa pembangunan daerah perlu bersifat multifaset. Sangat penting bahwa pembangunan daerah mencakup "pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang adil di seluruh wilayah, dan keberlanjutan lingkungan." Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan daerah adalah upaya komprehensif yang tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial.

Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa dokumen formal seperti RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus

digunakan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara bertahap. Meskipun masing-masing dokumen ini memiliki fungsi spesifik, semuanya bekerja sama untuk memastikan bahwa semua inisiatif pembangunan daerah mengikuti jalur yang tepat dan terukur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, proses persiapan sama pentingnya dengan hasilnya. Perencanaan berbasis data, atau perencanaan berbasis bukti, merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan yang kurang tepat sasaran seringkali tidak berbasis data. Misalnya, suatu wilayah berisiko gagal atau memiliki dampak yang kecil jika mengembangkan program untuk mengurangi kemiskinan tanpa memahami penyebab mendasar kemiskinan di daerah tersebut. Strategi berbasis data ini sejalan dengan teori perencanaan rasional Faludi (1973), yang menyatakan bahwa perencanaan harus dimulai dengan pengumpulan dan analisis data sebelum mengembangkan keputusan kebijakan yang didukung secara ilmiah.

Pedoman utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebuah dokumen perencanaan strategis. RPJMD dikembangkan setiap lima tahun, sesuai dengan masa jabatan kepala daerah, dan semua pejabat daerah dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menciptakan inisiatif pembangunan. RPJMD menguraikan visi, misi, tujuan, target, strategi, dan arah kebijakan yang jelas untuk pembangunan. Hal ini memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh Organisasi Aparat

daerah (OPD) selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan menawarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai dokumen administratif dan instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang efektif antar Organisasi Aparat Daerah (OPD) sangat penting untuk pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendidikan, kesehatan, ekonomi, urusan sosial, dan infrastruktur termasuk di antara bidang fokus masing-masing OPD. Proyek-proyek ini berisiko tumpang tindih atau bahkan bertentangan jika tidak dikoordinasikan dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang bertindak sebagai penghubung untuk memastikan bahwa semua OPD beroperasi secara sejalan dan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditentukan, memainkan peran penting dalam situasi ini.

Perkembangan perencanaan pembangunan saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan pembangunan global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah agenda global yang memiliki dampak besar pada arah pembangunan daerah. Sebagai perluasan dari agenda pembangunan sebelumnya, SDGs merupakan kerangka kerja untuk pembangunan global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Sejumlah tujuan dan target dalam agenda ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di Indonesia, SDGs telah diadaptasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut

untuk menyesuaikan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan agar selaras dengan tujuan dan arah pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara nasional dan global. Dengan demikian, SDGs berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.

Penerapan SDGs di tingkat daerah bukanlah proses yang bersifat langsung, melainkan memerlukan penyesuaian dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah. Target dan indikator yang bersifat global perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan ukuran kinerja yang sesuai dengan kewenangan serta kondisi daerah. Proses penyesuaian ini membutuhkan kemampuan perencanaan yang memadai, dukungan data yang relevan, serta koordinasi lintas sektor yang efektif di lingkungan pemerintah daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen yang paling strategis untuk mengintegrasikan agenda SDGs. Keberhasilan integrasi SDGs ke dalam RPJMD sangat bergantung pada peran lembaga perencana daerah dalam mengelola proses perencanaan tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, SDGs dapat berfungsi sebagai acuan strategis dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan dinamika pembangunan nasional dan global.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah

daerah. SDGs yang telah diadopsi dalam kebijakan pembangunan nasional menuntut agar arah pembangunan daerah juga disusun sejalan dengan tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. Apabila SDGs tidak diintegrasikan secara jelas ke dalam dokumen perencanaan daerah, maka agenda pembangunan berkelanjutan berpotensi tidak terakomodasi secara optimal dalam kebijakan pembangunan daerah. Pentingnya integrasi SDGs ke dalam RPJMD juga berkaitan dengan upaya menjaga keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah daerah tidak hanya menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan daerah, tetapi juga perlu memastikan bahwa perencanaan tersebut tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional yang telah mengakomodasi SDGs. Namun demikian, proses integrasi SDGs ke dalam RPJMD bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Tujuan dan indikator SDGs yang bersifat global perlu disesuaikan dengan kondisi, kewenangan, dan kapasitas daerah. Tanpa adanya proses penyesuaian dan mekanisme integrasi yang jelas, RPJMD berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa keterkaitan yang kuat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Integrasi SDGs ke dalam RPJMD merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Integrasi tersebut tidak hanya sebatas mencantumkan tujuan SDGs dalam dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip dan arah pembangunan berkelanjutan benar-benar tercermin dalam kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Seiring dengan pentingnya integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

keberadaan lembaga perencana daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Peran yang dijalankan oleh pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu komponen terpenting untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Karena mereka paling dekat dengan masyarakat, memahami tuntutan lokal, dan memiliki wewenang penuh melalui otonomi daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, pemerintah daerah berada di garis depan implementasi pembangunan. Karena desentralisasi, pemerintah daerah kini menjadi pemain kunci dalam membuat rencana, menetapkan tujuan, dan mengawasi sumber daya pembangunan di wilayah mereka, daripada sekadar melaksanakan program pusat. Dalam merumuskan strategi pembangunan, pemerintah daerah memainkan peran penting. Selain merumuskan kebijakan dan program, mereka juga bertanggung jawab untuk mengorganisir berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan berbagai sektor pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, sangat penting untuk mencapai pembangunan di Tanjungpinang. Strategi ini memastikan pembangunan yang komprehensif dan mempertimbangkan setiap faktor yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANG) adalah lembaga yang berperan strategis terbesar dalam memandu pembangunan daerah. Posisi Bappeda sebagai badan perencanaan sangat penting dalam memastikan bahwa semua perencanaan didasarkan pada data yang andal. Sebagai koordinator

utama dalam kapasitas ini, Bappelitbang terhubung dengan Organisasi Aparat Daerah (OPD) lainnya untuk memastikan bahwa semua proyek yang direncanakan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Karena pembangunan daerah tidak dapat terjadi dalam ruang hampa, fungsi ini sangat penting. Setiap sektor saling terkait, termasuk infrastruktur, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program yang diimplementasikan tanpa perencanaan terpadu berisiko tidak efektif atau bahkan tumpang tindih. Bappelitbang bertindak sebagai "direktur utama" dalam situasi ini, memastikan bahwa semua rencana dan program saling melengkapi. Seiring dengan fokus tujuan pembangunan daerah pada peningkatan pembangunan berkelanjutan. Peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi semakin penting karena Bappelitbang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program daerah, terlepas dari ukurannya, berfokus pada peningkatan standar hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, mereka harus mampu mengidentifikasi isu-isu sosial ekonomi yang paling signifikan, termasuk ketidaksetaraan antar daerah, kesehatan masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan layanan pendidikan. Kolaborasi Bappelitbang melampaui perencanaan. Mereka perlu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, sektor swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan instansi pemerintah daerah (PPH) yang menangani masalah teknis. Kerja sama tim yang efektif sangat penting untuk memastikan implementasi rencana. Pembangunan akan kesulitan mencapai tujuannya tanpa koordinasi yang efisien.

Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik yang memerlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang memiliki peran strategis baik dari sisi pemerintahan maupun pembangunan wilayah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan lintas sektor secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Di Kota Tanjungpinang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru untuk periode 2025–2029 sedang disusun, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal. Untuk mempertimbangkan keinginan masyarakat setempat, dokumen ini dikembangkan melalui proses partisipatif yang mencakup konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungpinang (RPJMD) terkait dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. RPJMD didasarkan pada RPJPD Kota Tanjungpinang (2005-2025), RPJMN (2015-2019), RPJMD Provinsi Kepulauan

ualitas hidup daerah melalui faktor sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Setiap tahun, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan arah pembangunan melalui dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RKRiau (2016-2021), dan Rencana Tata Ruang Kota Tanjungpinang (RTRW) (2014-2034).

Setiap tahun, pembangunan Tanjungpinang berfokus pada peningkatan daya saing dan kPD), yang berfungsi sebagai acuan untuk Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Berikut salah satu arah pembangunan tahunan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2019- 2023.

Gambar 1.1. Arah Pembangunan Tahunan 2019- 2023



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

Gambar di atas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kota Tanjungpinang memprioritaskan topik-topik utama setiap tahunnya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama. Kemudian, pada tahun 2020, fokus pembangunan bergeser ke sektor kreatif dan pariwisata. Pada tahun 2021, pengembangan pusat kebudayaan Melayu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Tahun 2022 lebih fokus ke arah reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi. Tujuan utamanya, pada tahun 2023, adalah untuk mentransformasi masyarakat menjadi lebih sejahtera. Perencanaan pembangunan Kota Tanjungpinang menunjukkan pentingnya peran lembaga perencana daerah dalam

mengelola proses perencanaan pembangunan yang kompleks. Kondisi ini menjadi dasar bagi Bappelitbang Kota Tanjungpinang dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam RPJMD Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana tujuan dan target SDGs yang bersifat luas dan global dapat diterjemahkan menjadi kebijakan daerah yang lebih konkret dan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota. RPJMD menuntut perumusan sasaran dan program yang jelas, sementara SDGs memiliki cakupan yang sangat beragam, sehingga proses penyesuaian ini membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak berhenti pada tataran konsep semata. Tantangan lainnya berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan data perencanaan. Dalam praktik perencanaan daerah, data yang digunakan berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan karakteristik dan standar yang berbeda. Perbedaan tersebut sering menyulitkan dalam menyusun indikator yang seragam dan saling terhubung antara RPJMD dan tujuan SDGs. Kondisi ini menuntut peran BAPPEDA untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan data agar perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara konsisten.

Sebagai kota dengan karakteristik wilayah perkotaan dan kepulauan, Tanjungpinang juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam pemerataan layanan pembangunan. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan daerah dalam merancang program pembangunan yang sepenuhnya selaras dengan tujuan SDGs. Oleh karena itu, integrasi SDGs ke dalam RPJMD tidak hanya

membutuhkan komitmen kebijakan, tetapi juga kemampuan perencanaan yang realistis dan sesuai dengan kondisi daerah. Dengan demikian, permasalahan dan tantangan integrasi SDGs ke dalam RPJMD Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah memerlukan penguatan peran kelembagaan, koordinasi yang efektif, serta pengelolaan data yang baik.

Uraian diatas menunjukkan bahwa komponen kunci dari proses perencanaan pembangunan daerah adalah integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pengelolaan dan koordinasi proses perencanaan oleh lembaga perencanaan daerah sangat memengaruhi keberhasilan integrasi ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola perencanaan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANG) memainkan peran penting dalam mengintegrasikan tujuan dan prinsip SDGs ke dalam RPJMD. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai capaian pembangunan atau dampak kebijakan terhadap masyarakat, melainkan berfokus pada proses dan peran kelembagaan Bappelitbang dalam integrasi SDGs ke dalam RPJMD Kota Tanjungpinang. Untuk menjaga kejelasan dan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi pembahasan pada beberapa tujuan SDGs yang dinilai relevan dengan substansi perencanaan pembangunan daerah serta sering muncul dalam dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang. Pembatasan tersebut dilakukan agar analisis lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah. Tujuan pertama yang menjadi perhatian adalah SDG 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, mengingat Tanjungpinang

merupakan wilayah perkotaan yang memerlukan perencanaan terpadu terkait penataan ruang, infrastruktur, dan pelayanan perkotaan. Integrasi tujuan ini ke dalam RPJMD menuntut peran perencanaan yang kuat agar arah pembangunan kota dapat dirumuskan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Selanjutnya, SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dipilih karena berkaitan langsung dengan perencanaan pengembangan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal yang menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Tujuan ini memerlukan penyelarasan program lintas sektor agar kebijakan ekonomi yang dirumuskan dalam RPJMD dapat berjalan searah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas juga menjadi fokus karena pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang membutuhkan perencanaan jangka menengah yang matang, baik dari sisi penyediaan layanan maupun pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Integrasi tujuan ini ke dalam RPJMD menuntut kemampuan perencanaan untuk menyelaraskan kebutuhan pendidikan dengan kapasitas daerah. Sementara itu, SDG 1 mengenai pengurangan kemiskinan dipahami dalam penelitian ini sebagai isu perencanaan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, bukan sebagai penilaian terhadap kondisi sosial masyarakat. Pembahasan tujuan ini difokuskan pada bagaimana isu kemiskinan direspons dalam dokumen perencanaan dan bagaimana peran Bappelitbang dalam mengoordinasikan integrasinya ke dalam RPJMD. Dengan membatasi pembahasan pada keempat tujuan SDGs tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran BAPPEDA dalam proses integrasi SDGs ke dalam RPJMD Kota

Tanjungpinang secara lebih terfokus dan mendalam, tanpa keluar dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Sofianto (2019) dalam penelitiannya, integrasi target dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah di Jawa Tengah belum berjalan secara optimal karena SDGs masih sering dipahami sebagai tanggung jawab Bappelitbang semata, padahal pelaksanaannya menuntut keterlibatan lintas sektor, ketersediaan data yang memadai, serta koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Penelitian tersebut pada dasarnya membahas bagaimana indikator SDGs diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam kesesuaian indikator dengan kondisi daerah, lemahnya sinkronisasi program, serta terbatasnya dukungan data. Dengan demikian, penelitian Sofianto lebih menekankan pada proses integrasi SDGs ke dalam perencanaan daerah secara umum, bukan secara khusus pada peran kelembagaan Bappelitbang dalam satu wilayah tertentu. Sementara itu, menurut Rondinelli (1981), perencanaan pembangunan perlu dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat sasaran karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan, potensi, dan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Pemikiran ini relevan dengan penelitian saya karena BAPPEDA sebagai lembaga perencana daerah memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan tujuan pembangunan yang bersifat nasional maupun global ke dalam kebijakan daerah yang lebih konkret dan sesuai dengan kondisi lokal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian Sofianto dan pemikiran Rondinelli sama-sama menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang

terarah, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan daerah. Namun, terdapat perbedaan yang menjadi dasar gap dalam penelitian ini, yaitu belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran BAPPEDA Kota Tanjungpinang dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam RPJMD, terutama dengan melihat bagaimana proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perencanaan dijalankan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis peran BAPPEDA Kota Tanjungpinang dalam integrasi SDGs ke dalam RPJMD, sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian terdahulu dan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran BAPPEDA dalam integrasi SDGs ke dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) dalam Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam RPJMD Kota Tanjungpinang”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang dalam mengintegrasikan prinsip dan target Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)?

2. Apa saja kendala dan peluang yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang dalam proses integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang dalam mengintegrasikan prinsip dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang dalam proses integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta menjadi acuan, masukan, maupun bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada peran Bappelitbang dalam integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada Bappelitbang Kota Tanjung Pinang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berintegrasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan serta mengasah keterampilan penulis dalam bidang tertentu. Melalui proses pencarian, evaluasi, dan sintesis informasi, penulis akan lebih memahami topik yang diteliti sekaligus meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan informasi.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah, peningkatan pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat. Khususnya, melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, Bappelitbang dapat memastikan bahwa RPJMD sudah

mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) , mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dan memperoleh dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan.

